

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Tamansari

Pada awalnya Desa Tamansari memiliki dua desa, yaitu desa Gunung Pandak dan desa Kepel, dimana desa Gunung Pandak yang diperintah oleh Mbah Selo dianggap sebagai tempat pembukaan desa Gunung Pandak, dan desa Kepel yang dipimpin oleh Nolo Setro. Namun karena seringnya terjadi bentrokan di desa Gunung Pandak menyusul meninggalnya petinggi kedua desa tersebut, masyarakat menginginkan adanya penggabungan antara dua desa yaitu desa Gunung Pandak dan desa Kepel dan diadakan pilkada. Pemilihan ini diadakan untuk memerintah dua desa, desa Kepel dan Gunung Pandak yang kemudian dimenangkan oleh Pak Saba'i. Desa ini memiliki taman yang sangat indah penuh dengan bunga dan di tengah taman terdapat aliran sungai yang jernih dimana banyak angsa putih berenang. Maka untuk mengingat keindahan taman tersebut, nama desa sebagai desa Tamansari dapat dipertimbangkan dan diperhitungkan berdasarkan nilai sejarah desa Tamansari.

Sejarah pemerintahan desa sejak pemerintahan desa Tamansari terbentuk, desa Tamansari dipimpin oleh kepala desa dari keturunan petinggi desa Gunung Pandak dan petinggi desa Kepel. Dimulai dari kepala desa Saba'i, Temo, Saputri, Mustari Hadi Purnomo, Tahir Suwandi, Soetadji, Sudiono, Soetadji, Misnawi dan yang sekarang

dipimpin oleh Bapak Soetadji. Dari sejarah itulah pada akhirnya menjadi desa Tamansari yang Alhamdulillah sampai saat ini menjadi desa yang subur dan makmur serta didalamnya terdapat masyarakat yang aman dan tentram. (Sumber data : Kantor Desa Tamansari, 2021)

2. Kondisi Umum Desa

Desa Tamansari terletak di Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo yang memiliki luas 392.394 Ha, yang terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Bukolan, Dusun Budagan, Dusun Sumber Kepoh, dan Dusun Parsehan. Batas utara desa Tamansari adalah desa Kalisalam dan desa Randu Putih, sebelah timur desa Curah Sawu Kecamatan Gending, sebelah selatan yaitu desa Mranggon Lawang dan Sekar Kare dan sebelah barat yaitu desa Kedung Dalem dan Tegal Redjo.

a. Luas Wilayah

Luas wilayah desa Tamansari menurut sumber dari kantor desa Tamansari terdiri dari : *pertama*, luas pemukiman dengan luas 52.106 Ha; *kedua*, luas persawahan dengan luas 150.684 Ha; *ketiga*, luas perkebunan 135.623 Ha; *keempat*, luas kuburan sekitar 1.750 Ha; *kelima*, luas pekarangan sekitar 15.611 Ha; *keenam*, luas taman sekitar 250 Ha; *ketujuh*, luas perkantoran dengan luas 300 Ha; *kedelapan*, luas prasarana umum lainnya dengan luas 19.389 Ha. Dimana jumlah luas wilayah keseluruhan desa Tamansari 393.394 Ha. (Sumber data : Kantor Desa Tamansari, 2021)

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk desa Tamansari pada tahun 2021 tercatat 7.863 jiwa yang terdiri dari 3.921 laki-laki dan 3.942 perempuan yang tersebar di lima dusun. Dimana jumlah data penduduk setiap dusun di desa Tamansari Kecamatan Dringu sebagai berikut : *pertama*, dusun Krajan dengan jumlah 906 laki-laki dan 927 perempuan dengan total 1.833 jiwa; *kedua*, dusun Bukolan dengan jumlah 1.137 laki-laki dan 1.158 perempuan total 2.295 jiwa; *ketiga*, dusun Budagan dengan jumlah 652 laki-laki dan 672 perempuan total 1.324 jiwa; *keempat*, dusun Sumber Kepoh dengan jumlah 362 laki-laki dan 382 perempuan total 744 jiwa; *kelima*, dusun Parsehan dengan jumlah 816 laki-laki dan 846 perempuan total sebanyak 1.662 jiwa. (Sumber data : Kantor Desa Tamansari, 2021)

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di desa Tamansari terdapat 2.056 perempuan yang tidak tamat SD dan 2.123 laki-laki yang tidak tamat SD. Sedangkan yang melanjutkan akademi sampai perguruan tinggi masih baru 29 untuk perempuan dan 34 untuk laki-laki.

Dimana data tingkat pendidikan di desa Tamansari kecamatan Dringu sesuai dari sumber data kantor desa sebagai

berikut : *pertama*, pada tahun 2018 yang tidak tamat SD terdiri dari 1.023 laki-laki dan 2.018 perempuan. Pada tahun 2019 terdiri dari 1.027 laki-laki dan 2.098 perempuan. Dan pada tahun 2020 terdiri dari 1.056 laki-laki dan 2.123 perempuan; *kedua*, pada tahun 2018 yang tamat SD terdiri dari 1.007 laki-laki dan 1.234 perempuan. Pada tahun 2019 terdiri dari 2.098 laki-laki dan 2.541 perempuan. Dan tahun 2020 terdiri dari 2.098 laki-laki dan 2.340 perempuan; *ketiga*, pada tahun 2018 yang tamat SLTP terdiri dari 624 laki-laki dan 793 perempuan. Dan tahun 2019 ada 789 laki-laki dan 908 perempuan. Sedangkan pada tahun 2020 ada 898 pria dan 1.098 wanita; *keempat*, pada tahun 2018 yang tamat SLTA ada 234 laki-laki dan 345 perempuan. Dan pada tahun 2019 terdiri dari 378 laki-laki dan 415 perempuan. Sedangkan pada tahun 2020 terdiri dari 401 laki-laki dan 597 perempuan; *kelima*, pada tahun 2018 yang tamat akademik/perguruan tinggi ada 4 laki-laki dan 8 perempuan. Pada tahun 2019 ada 17 laki-laki dan 23 perempuan. Sedangkan pada tahun 2020 ada 29 laki-laki dan 34 perempuan. (Sumber data : Kantor Desa Tamansari, 2021)

d. Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah lembaga berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu kearah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Di desa Tamansari lembaga pendidikan terdiri ada 20 lembaga, diantaranya

yaitu : *pertama*, lembaga pendidikan TK pada tahun 2018 terdiri dari 2 lembaga, pada tahun 2019 terdiri dari 3 lembaga dan tahun 2020 ada 3 lembaga; *kedua*, lembaga pendidikan SD pada tahun 2018 terdiri dari 4 lembaga, pada tahun 2019 terdiri dari 4 lembaga dan juga pada tahun 2020 terdiri dari 4 lembaga. Namun, di desa Tamansari memiliki kekurangan lembaga pendidikan yaitu masih belum ada lembaga pendidikan SLTP, SLTA/SMK, PTN, PTS, SLB. (Sumber data : Kantor Desa Tamansari, 2021)

e. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian adalah pekerjaan yang menjadi pokok kehidupan. Mata pencaharian dapat diartikan pula sebagai segala aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Sebagian besar penduduk desa Tamansari bekerja pada sektor pertanian, disusul sektor nelayan dan perdagangan. Dimana mata pencaharian tersebut antara lain : *pertama*, petani terdiri dari 3.612 jiwa pada tiga tahun terakhir; *kedua*, buruh tani terdiri dari 4.542 jiwa; *ketiga*, buruh migran terdiri dari 92 jiwa perempuan dan 55 jiwa laki-laki; *keempat*, pengrajin industri rumah tangga terdiri dari 205 jiwa; *kelima*, pedagang keliling terdiri 193 jiwa; *keenam*, peternak terdiri dari 256 jiwa; *ketujuh*, nelayan terdiri dari 369 jiwa; *delapan*, montir terdiri dari 59 jiwa; *sembilan*, dokter swasta ada 6 jiwa; *sepuluh*, bidan swasta terdiri dari 3 jiwa; *sebelas*, perawat swasta terdiri dari 3 jiwa; *dua belas*, pembantu

rumah tangga ada 35 jiwa; *tiga belas*, TNI dan POLRI terdiri dari 15 jiwa; *empat belas*, pensiunan PNS/TNI/POLRI terdiri dari 393 jiwa; *lima belas*, pengusaha kecil menengah terdiri atas 53 jiwa; *enam belas*, karyawan perusahaan swasta terdiri 653 jiwa; *tujuh belas*, karyawan perusahaan pemerintahan terdiri 225 jiwa; *delapan belas*, makelar/mediator terdiri 39 jiwa; *Sembilan belas*, sopir terdiri 67 jiwa; *dua puluh*, tukang becak terdiri 87 jiwa; *dua puluh satu*, tukang ojek terdiri 24 jiwa; *dua puluh dua*, tukang cukur terdiri dari 5 jiwa; *dua puluh tiga*, tukang batu/kayu terdiri 76 jiwa; *dua puluh empat*, kusir dokar 6 jiwa. Namun, kehidupan masyarakat di desa Tamansari kekurangan pegawai negeri sipil, notaris, dukun binaan desa, pelayanan pengobatan alternatif, pelatih swasta, pengusaha besar, arsitektus, biksu dan seniman. (Sumber data : Kantor Desa Tamansari, 2021)

3. Struktur Kelembagaan Desa

Kelembagaan desa merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama, tergabung dalam lembaga atau organisasi desa dan mempunyai tujuan serta mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu pelaksanaan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam pemerintahan desa, kepala desa (ST) yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di bantu oleh BPD (TK), SEKDES (BS),

Kasi Kesra (FR), Pemerintahan (BS) dan Pembangunan (TK). Dimana BPD merupakan badan musyawarah desa yang memiliki misi menggali aspirasi masyarakat, menjawab keinginan masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas kasi kesra membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan membantu kepala desa sebagai tugas operasional dan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, dan SEKDES merupakan sekretaris desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya, SEKDES didukung oleh kepala perencanaan dan generalisasi (SR) dan kepala keuangan (DY) yang bertanggung jawab untuk membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kepala urusan keuangan memiliki tugas mengurus administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran. Selain itu ada kepala dusun, dimana kepala dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya dimana tugas kepala dusun pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. (Sumber data : Kantor Desa Tamansari, 2021)

4. Visi dan Misi Desa Tamansari

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Dimana visi desa Tamansari adalah : Terwujudnya desa Tamansari yang berahlaqul karimah, makmur, sejahtera, dan berbudaya berdasarkan iman serta berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dilaksanakanlah beberapa misi yang diantaranya : *pertama*, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik; *kedua*, meningkatkan pelayanan pemenuhan hak-hak dasar rakyat; *ketiga*, pembangunan infrastruktur desa. (Sumber data : Kantor Desa Tamansari, 2021)

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Data yang disajikan peneliti dalam skripsi ini sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan, baik menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sesuai dengan judul penelitian yaitu peran kepala desa dalam meningkatkan keamanan masyarakat di desa Tamansari kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo. Di dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu : *pertama*, kepala desa (ST); *kedua*, perangkat desa (BS); *ketiga*, ketua RT (RS); *keempat*, masyarakat dusun Krajan (IY); *kelima*, masyarakat dusun Krajan (NW); *enam*, masyarakat dusun Bukolan (HL); *tujuh*, masyarakat dusun Sumber Kepoh (ED); *depalan*, masyarakat dusun Budagan (PS);

sembilan, masyarakat dusun Parsehan (SL). Dalam penelitian ini, peneliti telah memberikan batasan-batasan yang akan di gunakan untuk mengetahui bagaimana peran kepala desa dalam meningkatkan keamanan masyarakat di desa Tamansari kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo. Maka peneliti menetapkan tahapan-tahapan beserta indikatornya dan pengukuran dari teori Lingga (2015) sebagai berikut : *pertama*, peranan sebagai pemimpin; *kedua*, peranan sebagai *monitor*; *ketiga*, peranan sebagai *stabilisator*; *kelima*, peranan sebagai pemecah masalah.

a. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di desa Tamansari kecamatan Dringu. Kepala desa melakukan rapat atau pertemuan untuk membuat beberapa program, pengawasan dan evaluasi yang harus dilaksanakan. Didalam kegiatan tersebut, kepala desa, staff desa, dan juga masyarakat terlibat dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kegiatan yang telah direncanakan oleh kepala desa yaitu tentang keamanan yang dimana setiap dusun melakukan gerakan siskamling guna mencegah terjadinya pencurian, membangun pos ronda disetiap dusun.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan berbagai informan yang diperoleh peneliti. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam meningkatkan keamanan masyarakat di desa Tamansari kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo, peneliti menemukan

beberapa persamaan pendapat dari berbagai informan mengenai peran kepala desa sebagai pemimpin, sebagai monitor, sebagai stabilisator, dan sebagai pemecah masalah, yaitu : *pertama*, kepala desa sebagai pemimpin melakukan perannya dengan baik; *kedua*, peran kepala desa sebagai monitor memberikan informasi cukup baik kepada masyarakat; *ketiga*, kepala desa sebagai stabilisator menjaga keamanan dengan baik; *keempat*, kepala desa sebagai pemecah masalah menyelesaikan masalah dengan baik karena melibatkan pihak berwajib, perangkat desa, masyarakat, rt dan rw. Selain peneliti menemukan persamaan pendapat, peneliti juga menemukan perbedaan pendapat mengenai peran kepala desa yaitu : *pertama*, kepala desa dalam memimpin suatu organisasi masih kurang maksimal; *kedua*, kepala desa dalam memberikan informasi tentang keamanan masih kurang karena selama ini kepala desa masih memberikan informasi tentang bantuan sosial; *ketiga*, kepala desa dalam menjaga keamanan di desa ini masih kurang karena terdapat beberapa kasus pencurian dalam setahun terakhir.

Adapun studi dokumentasi yang diperoleh bahwa penelitian ini benar-benar didukung oleh peran kepala desa. Kepala desa menjalankan perannya sebagai pemimpin, sebagai monitor, sebagai stabilisator, dan sebagai pemecah masalah. Dimana kepala desa sebagai pemecah masalah dalam menyelesaikan permasalahan sengketa tanah di dusun Bukolan, kepala desa sebagai monitor dalam melakukan musyawarah lingkungan bersama masyarakat di dusun Parsean dan juga kepala desa

melakukan musyawarah tentang tempat kuliner ikan asap bersama dinas PUPR dan satpol PP, kepala desa sebagai pemimpin dan monitor dalam memberikan informasi tentang rencana kerja pemerintahan desa bersama staff dan masyarakat desa di balai desa Tamansari, kepala desa melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam musyawarah desa tentang verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang dimana penggabungan antara teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain triangulasi teknik penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber, dimana sumber yang terdapat dalam penelitian ini dari berbagai informan seperti kepala desa (ST), perangkat desa (BS), ketua RT (RS), masyarakat dusun Krajan (IY), masyarakat dusun Krajan (NW), masyarakat dusun Bukolan (HL), masyarakat dusun Sumber Kepoh (ED), masyarakat dusun Budagan (PS), masyarakat dusun Parsehan (SL) dan Lingga (2015) tentang peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Panggak Darat kecamatan Lingga kabupaten Lingga.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kepala desa melakukan rapat yang melibatkan staff desa dan masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintahan desa agar terlaksana sesuai dengan harapan. Dimana program yang telah direncanakan oleh kepala desa dalam bidang keamanan melakukan gerakan siskamling disetiap dusun guna

mencegah terjadinya pencurian. Selain itu peran kepala desa sebagai pemecah masalah cukup baik karena melibatkan pihak berwajib, perangkat desa, masyarakat, rt dan rw. Dan juga peran kepala desa sebagai pemimpin, monitor, dan stabilisator masih kurang maksimal.

b. Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, faktor penghambat dalam meningkatkan keamanan masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, tidak dilakukannya kegiatan siskamling, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai keamanan, tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu penyebab terjadinya tindakan pencurian yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan berbagai informan yang diperoleh peneliti. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan keamanan masyarakat dan penyebab terjadinya tindakan pencurian, peneliti menemukan persamaan pendapat dari berbagai informan yaitu : *pertama*, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan keamanan; *kedua*, tidak ada kegiatan siskamling disetiap dusun atau wilayah; *ketiga*, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang keamanan; *keempat*, tingkat pendidikan yang rendah yang mengakibatkan banyak orang atau masyarakat yang tidak peduli dengan keamanan di wilayahnya sendiri. Selain itu,

peneliti juga menemukan beberapa perbedaan pendapat mengenai faktor penghambat yaitu : *pertama*, kurangnya lapangan pekerjaan; *kedua*, faktor ekonomi; *ketiga*, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan.

Adapun studi dokumentasi yang diperoleh bahwa pelaksanaan keamanan masyarakat tidak terlepas dari faktor penghambat. Kurangnya partisipasi masyarakat yang enggan untuk ikut serta dalam pelaksanaan siskamling, tidak dilakukannya kegiatan siskamling, faktor ekonomi yang dimana mata pencaharian masyarakat di dominasi oleh sektor pertanian, perdagangan dan nelayan, dimana tingkat pendidikan masyarakat rendah dapat mempengaruhi masyarakat dalam menerima segala informasi mengenai keamanan.

Hasil penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang dimana penggabungan antara teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain triangulasi teknik penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber, dimana sumber yang terdapat dalam penelitian ini dari berbagai informan seperti kepala desa (ST), perangkat desa (BS), ketua RT (RS), masyarakat dusun Krajan (IY), masyarakat dusun Krajan (NW), masyarakat dusun Bukolan (HL), masyarakat dusun Sumber Kepoh (ED), masyarakat dusun Budagan (PS), masyarakat dusun Parsehan (SL), Sukmana (2019) tentang peranan kepala desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa Aikmel kabupaten Lombok Timur provinsi Nusa Tenggara Barat dan Setiawan (2017)

mengenai partisipasi masyarakat islam pada pelaksanaan sistem keamanan lingkungan di desa Hajimena kecamatan Natar Lampung Selatan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam meningkatkan keamanan masyarakat dan penyebab terjadinya tindakan pencurian yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan siskamling, faktor ekonomi yang dimana mata pencaharian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan nelayan, tingkat pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi masyarakat dalam menerima informasi dari pemerintah desa, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai keamanan.

c. Solusi Dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, banyak cara yang dilakukan oleh kepala desa dalam meningkatkan keamanan masyarakat di desa Tamansari. Peran kepala desa sangat penting untuk menggerakkan desa terutama dalam hal keamanan sehingga desa tercipta atmosfer positif yang membuat warga desa merasa aman akan keamanan di desa ini. Dimana solusi yang dilakukan adalah melakukan rapat atau pertemuan tentang keamanan, pembangunan pos ronda, dan melaksanakan kegiatan siskamling.

Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan berbagai informan. Untuk mengetahui solusi dalam meningkatkan keamanan masyarakat di desa Tamansari, peneliti menemukan persamaan pendapat mengenai solusi keamanan masyarakat yaitu : *pertama*, mengaktifkan kembali kegiatan siskamling; *kedua*, melakukan sosialisasi tentang keamanan kepada masyarakat; *ketiga*, membangun pos ronda setiap dusun. Selain itu, peneliti juga menemukan perbedaan pendapat mengenai solusi keamanan masyarakat yaitu : *pertama*, melakukan evaluasi setiap kegiatan berlangsung; *kedua*, memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang keamanan; *ketiga*, bekerja sama dengan pihak berwajib.

Adapun studi dokumentasi yang diperoleh bahwa solusi dalam meningkatkan keamanan masyarakat yaitu pelaksanaan kegiatan siskamling telah dilakukan di beberapa dusun dan juga pembangunan pos ronda telah dijalankan di beberapa dusun.

Hasil penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang dimana penggabungan antara teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain triangulasi teknik penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber, dimana sumber yang terdapat dalam penelitian ini dari berbagai informan seperti kepala desa (ST), perangkat desa (BS), ketua RT (RS), masyarakat dusun Krajan (IY), masyarakat dusun Krajan (NW), masyarakat dusun Bukolan (HL), masyarakat dusun Sumber Kepoh (ED), masyarakat dusun Budagan (PS), masyarakat dusun Parsehan

(SL), dan Adnan (2020) tentang upaya pemerintah desa meningkatkan partisipasi masyarakat pada sistem keamanan lingkungan di desa Saninten.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa solusi dalam meningkatkan keamanan masyarakat yaitu, pengaktifan kembali kegiatan siskamling, melakukan pembangunan pos ronda, melakukan pengawasan dan evaluasi dalam kegiatan keamanan guna mengetahui perkembangan dari kegiatan tersebut.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti kepala desa melakukan rapat atau pertemuan untuk membuat beberapa program, pengawasan, dan evaluasi. Di dalam kegiatan tersebut kepala desa, staff desa, dan masyarakat terlibat dalam pelaksanaan rencana kerja pemerintahan desa yang dimana bisa terlaksana sesuai dengan harapan. Kegiatan yang telah terencana dalam bidang keamanan yakni melakukan gerakan siskamling guna mencegah terjadinya pencurian dan juga membangun pos ronda agar meningkatkan partisipasi masyarakat masyarakat. Peran kepala desa sebagai pemimpin cukup baik karena kepala desa melakukan musyawarah lingkungan bersama masyarakat di dusun Parsehan dan juga kepala desa melakukan musyawarah tentang tempat kuliner ikan asap bersama dinas PUPR dan satpol PP, kepala desa selalu memberikan informasi tentang rencana kerja pemerintah desa bersama staff dan masyarakat di balai desa, selain itu kepala desa cukup baik dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan seperti masalah sengketa tanah yang terjadi di dusun Bukolan bersama perangkat desa dan masyarakat desa.

Namun peran kepala desa sebagai stabilisator kurang maksimal, karena masih terdapat beberapa kasus pencurian yang terjadi di dusun

Krajan, dusun Parsean, dan dusun Bukolan. Dimana di dusun Krajan telah terjadi dua kali kasus pencurian selama setahun terakhir, di dusun Parsean terjadi hanya satu kali selama setahun terakhir dan di dusun Bukolan terjadi satu kali dalam satu tahun terakhir. Kasus pencurian tersebut termasuk indikator kriminalitas sebagaimana teori dari Prasetyono (2013) menunjukkan bahwa salah satu indikator kriminalitas yaitu jumlah perampokan yang terjadi di desa dan kelurahan dalam satu tahun terakhir. Selain stabilisator, peran kepala desa sebagai monitor juga kurang. Karena kepala desa kurang memberikan informasi tentang keamanan kepada masyarakat, kepala desa hanya memberikan informasi tentang adanya bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat.

Dimana hasil penelitian dari Lingga (2015) menunjukkan bahwa peran kepala desa masih belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, kepala desa masih memberikan informasi yang perlu diketahui masyarakat dan kepala desa belum optimal dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diharapkan kepala desa lebih optimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada guna mewujudkan desa dengan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Kepala desa harus mengambil langkah maksimal untuk membuat keputusan dan mengontrol penggunaan dana yang akan digunakan agar sesuai dengan apa yang akan digunakan dengan dana tersebut.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa sebagai pemimpin cukup baik dan kepala desa sebagai monitor selalu memberikan informasi tentang rencana kerja pemerintahan desa bersama staff dan masyarakat, kepala desa juga cukup baik dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Akan tetapi peran kepala desa sebagai stabilisator kurang maksimal, karena masih terdapat beberapa kasus pencurian yang terjadi di dusun Krajan, dusun Parsehan dan dusun Bukolan. Selain itu, peran kepala desa sebagai monitor dalam memberikan informasi tentang keamanan masih kurang karena selama ini kepala desa memberikan informasi tentang bantuan sosial kepada masyarakat.

b. Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa kendala dalam meningkatkan keamanan masyarakat dan penyebab terjadinya tindakan pencurian yaitu : kurangnya partisipasi masyarakat, tidak dilakukannya kegiatan siskamling, kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai keamanan, tingkat pendidikan yang rendah, serta faktor ekonomi. Dimana kurangnya partisipasi masyarakat di desa Tamansari dapat dikatakan masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya aspirasi masyarakat dalam melakukan kegiatan siskamling, selain itu juga masyarakat masih menolak untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan siskamling. Tidak dilakukannya kegiatan siskamling menjadi kendala dalam

meningkatkan keamanan, karena kegiatan siskamling ini masih terencana dan belum dilaksanakan oleh kepala desa, staff, maupun masyarakat sehingga dapat mengakibatkan adanya tindakan pencurian. Kegiatan siskamling yang dilakukan di dusun Krajan hanya inisiatif dari masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari tindakan pencurian.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai keamanan juga menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan keamanan, karena dengan adanya sosialisasi dari pemerintah desa bisa memberikan pengarahan kepada masyarakat bagaimana cara mencegah terjadinya pencurian, apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi adanya pencurian. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi masyarakat dalam menerima informasi mengenai keamanan masyarakat sehingga ada yang berpendapat bahwa keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah saja. Selain itu tingkat pendidikan di desa Tamansari menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakatnya mempunyai pendidikan yang cukup rendah, dimana kebanyakan masyarakatnya tidak tamat SD dan tamat SD.

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan terjadinya tindakan pencurian. Karena pada umumnya masyarakat desa Tamansari memiliki mata pencaharian yang di dominasi sektor pertanian, perdagangan, dan nelayan. Dengan mata pencaharian tersebut, mereka merasa kebutuhan sehari-hari masih belum tercukupi. Apabila kebutuhan ekonomi mereka

tidak tercukupi, maka mereka bisa melakukan tindakan pencurian. Dari hasil pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dimana hasil penelitian dari Sukmana (2019) ditemukan bahwa faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan fisik di desa Aikmel kabupaten Lombok Timur adalah rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, dan pola pikir masyarakat. Sedangkan hasil penelitian dari Setiawan (2017) menunjukkan bahwa kendala dalam partisipasi masyarakat tergantung kepada situasi setempat misalnya seperti pola pikir masyarakat, waktu, dan juga terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam meningkatkan keamanan masyarakat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan siskamling, tidak ada kegiatan siskamling di setiap dusun, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai keamanan, tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak peduli dengan keamanan diwilayahnya sendiri, dan juga faktor ekonomi yang di dominasi sektor pertanian, perdagangan dan nelayan yang mengakibatkan tidak tercukupi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka bisa melakukan tindakan perncurian agar terpenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Solusi Dalam Meningkatkan Keamanan Masyarakat di Desa Tamansari Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa solusi dalam meningkatkan keamanan masyarakat mengaktifkan kembali kegiatan siskamling dengan tujuan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siskamling dan juga guna mencegah atau mengurangi terjadinya tindakan pencurian, melakukan sosialisasi tentang keamanan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana caranya untuk mengurangi tindakan pencurian dan apa saja yang akan dilakukan dalam mencegah pencurian, melakukan evaluasi setiap kegiatan berlangsung agar kepala desa mengetahui perkembangan kegiatan tersebut setiap hari atau setiap minggu, bekerja sama dengan pihak berwajib dengan begitu apabila terjadi pencurian bisa di proses oleh pihak berwajib, dan juga membangun pos ronda di setiap dusun agar masyarakat mengetahui tanggung jawabnya untuk melaksanakan kegiatan siskamling. Pembangunan pos ronda telah terlaksana di dusun Krajan yang terdiri dari tiga pos ronda, dusun Sumber Kepoh terdiri dari satu pos ronda, dusun Bukolan terdiri dari tiga pos ronda, dan dusun Parsean satu pos ronda. Namun, pembangunan pos ronda di dusun Budagan masih belum terlaksana.

Dimana hasil penelitian dari Adnan (2020) upaya yang dilakukan pemerintah desa yaitu pengaktifan siskamling yang dilakukan oleh

beberapa warga dimulai pada pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB dan kegiatan ini dilakukan secara bergiliran, memasang penerangan di wilayah rawan pencurian, penyuluhan hukum mampu memberikan pengetahuan kepada warga akan bentuk-bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban, kegiatan sosialisasi dari pemerintah desa dalam memberikan pengarahan kepada warga tentang contoh-contoh pelanggaran keamanan dan ketertiban serta bagaimana cara menanggulangi dan mencegah khususnya pada pelanggaran pencurian, bekerja sama dengan polisi sektor dalam menanggulangi dan menjaga keamanan ketertiban lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa solusi dalam meningkatkan keamanan masyarakat pengaktifan kembali kegiatan siskamling, memberikan evaluasi atau pengarahan setiap kegiatan berlangsung, membangun pos ronda, bekerja sama dengan pihak berwajib. Akan tetapi solusi yang diberikan masih belum terlaksana, dikarenakan kepala desa masih membuat rencana kerja pemerintahan desa. Dari beberapa solusi tersebut, pembangunan pos ronda telah terlaksana di dusun Krajan, dusun Sumber Kepoh, dusun Bukolan, dan dusun Parsean. Namun, pembangunan pos ronda di dusun Budagan masih belum terlaksana. Selain itu, kegiatan siskamling dilakukan dari inisiatif masyarakat setiap dusun masing-masing.